

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana tentang status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih bergulir. Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang diajukan pemerintah belum mendapat lampu hijau dari warga Yogyakarta. Permasalahan ini semakin memanas pasca munculnya pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Kabinet 26 November 2010. Pernyataan Presiden mengenai sistem pemerintahan monarki dan demokrasi mengundang pendapat dan spekulasi dari berbagai pihak. Pendapat politik Presiden SBY bahwa tidak ada sistem monarkhi dalam penyusunan RUUK DIY karena akan bertabrakan dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi direspon dengan pernyataan politik pula oleh Sri Sultan HB X (Radar Jogja, Minggu 28 November 2010). Isu ini akhirnya menimbulkan ketegangan antara pemerintah pusat dengan pihak keraton Yogyakarta.

Sejak Sri Sultan HB X menjabat sebagai Gubernur DIY melalui mekanisme penetapan dan kemudian memasuki masa reformasi, pembahasan mengenai Keistimewaan DIY hanya sebatas wacana. Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur dalam dua kali masa jabatan. Sampai masa jabatan periode kedua habis, pembahasan keistimewaan DIY belum juga menemukan titik terang hingga presiden memperpanjang masa jabatan tiga tahun sampai Oktober 2011 kepada Sri Sultan

HB X dan Sri Paku Alam IX. Rancangan UUK DIY yang diharapkan telah selesai sebelum periode perpanjangan jabatan selesai ternyata belum terwujud. Sultan HB X dan Paku Alam IX kembali menjalani masa perpanjangan jabatan selama satu tahun.

Substansi mengenai keistimewaan DIY yang mengacu pada bidang politik dan pemerintahan ditegaskan dalam draft RUUK DIY mengenai pengakuan secara legal posisi Kesultanan dan Pura Pakualaman sebagai warisan budaya bangsa. DIY juga diusulkan memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Perbedaan pokok terletak pada pengintegrasian Kesultanan dan Pakualaman ke dalam struktur pemerintahan Provinsi DIY dan sekaligus pemisahan antara wewenang dan struktur pengelola urusan politik dan pemerintahan sehari-hari dengan urusan politik strategis. Pengintegrasian Kesultanan dan Pakualaman ke dalam struktur pemerintahan Provinsi DIY dilakukan melalui pemberian wewenang, berikut implikasi-implikasi yang melekat di dalamnya kepada Sultan dan Paku Alam sebagai satu kesatuan politik yang diposisikan sebagai Parardhya Keistimewaan¹.

Selain itu dalam bidang pertanahan, kewenangan istimewa meliputi kewenangan mengatur dan mengurus kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan Sultan Ground dan Paku Alam Ground. Kewenangan dalam bidang pertanahan juga diwujudkan melalui pengakuan secara khusus status hukum Kesultanan dan Pakualaman sebagai Badan Hukum Kebudayaan yang memiliki hak kepemilikan

¹ Parardhya adalah lembaga yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu-kesatuan yang mempunyai fungsi sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya, serta pengayom dan pemersatu masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. (<http://www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id/2008/09/25/365/> diakses pada Selasa 10 Mei 2011, 15.20 wib).

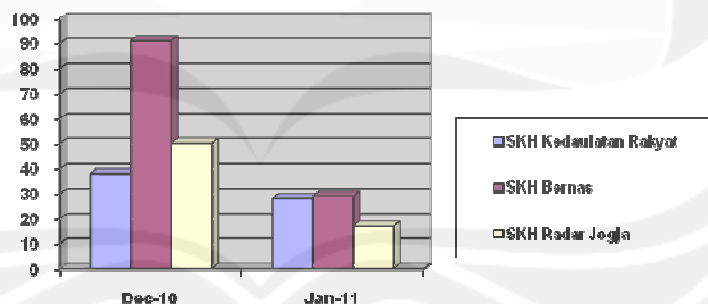
atas tanah dan aset lainnya. Sultan dan Paku Alam sebagai Parardhya berwenang dalam memberikan arah umum kebijakan, pertimbangan, persetujuan dan veto terhadap rancangan Peraturan Daerah Istimewa yang diajukan DPRD dan Gubernur dan atau Peraturan Daerah Istimewa yang berlaku. Kewenangan ini juga berlaku dalam bidang penataan ruang. Kewenangan Parardhya juga menjangkau Perda yang terkait kebudayaan, pertanahan dan penataan ruang yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota di DIY (<http://www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id/2008/09/25/365/> diakses pada Selasa 10 Mei 2011, 15.20 wib).

Perumusan RUUK DIY justru kini menjadi semakin *alot* dan tertunda. Permasalahan ini sejatinya tidak akan memanas bila ada kesepahaman antara pemerintah pusat dengan masyarakat Yogyakarta. Pemerintah pusat- yang diwakili oleh Mendagri, Gamawan Fauzi - melalui pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah (UU no.5 tahun 1974) mengendaki mekanisme pemilihan. Sedangkan masyarakat Yogyakarta dengan berpegang pada Pasal 18 UUD 1945 menghendaki adanya penetapan. Desakan untuk segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY pun semakin besar. Dalam Sidang Paripurna terbuka DPRD DIY, puluhan ribu warga Jogja memadati Jalan Malioboro untuk menyatakan dukungan terhadap penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY (Koran Bernas, Selasa 14 Desember 2010). Hal tersebut mengacu pada eksistensi status hukum keistimewaan DIY selanjutnya.

Di tengah gencarnya pembahasan mengenai RUUK DIY, beberapa surat kabar harian lokal Yogyakarta cukup *concern* dalam memberitakan masalah

tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan intensitas pemberitaan yang tinggi serta hampir selalu menjadi *headline* dalam beberapa pekan di penghujung tahun 2010 hingga awal 2011 (Lihat Diagram 1.). Sejalan dengan dinamika perjalanan status keistimewaan DIY yang mendapat sorotan tajam dari media massa terutama media massa lokal, topik artikel opini masih belum beranjak dari masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem pemerintahan dan politik Yogyakarta. Pada kurun waktu yang sama, artikel opini juga masih menunjukkan kecenderungannya dalam menyoroti masalah politik pemerintahan DIY. Apalagi di saat itu, terjadi peningkatan suhu politik antara pemerintah pusat dengan keraton yang berimbas munculnya gejolak di masyarakat.

Diagram 1.1. Kemunculan Artikel Berita Terkait dengan Isu Keistimewaan DIY di SKH Kedaulatan Rakyat, SKH Bernas dan SKH Radar Jogja Periode Desember 2010 – Januari 2011



Sumber: SKH Kedaulatan Rakyat, SKH Bernas, SKH Radar Jogja

Dalam penelitian ini surat kabar lokal yang dipilih adalah SKH Radar Jogja, SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Bernas. Dalam diagram di atas, ketiga surat kabar lokal tersebut menaruh perhatian lebih pada isu ini, ditandai dengan kemunculan artikel pada periode Desember 2010-Januari 2011 rata-rata lebih dari satu artikel berita perhari. Selain itu, pemilihan ini didasarkan karena ketiga surat kabar lokal tersebut cukup dikenal oleh masyarakat Yogyakarta dan memiliki

jangkauan pembaca yang cukup tinggi di wilayah DIY. SKH Kedaulatan Rakyat dan Bernas telah terbit di wilayah Yogyakarta lebih dari 65 tahun dan menjadi dua surat kabar harian tertua di DIY.² Sedangkan, SKH Radar Jogja yang merupakan anak cabang Jawa Pos Group, memiliki oplah mencapai 25.000 eksemplar pada tahun 2001.³ Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa ketiga koran lokal tersebut cukup merepresentasikan suara warga lokal di mana mereka juga menuangkan aspirasi mereka dalam bentuk opini di ketiga surat kabar di atas. Bahkan, untuk membuktikan konsistensi dalam mengawal proses perumusan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY, SKH Radar Jogja bahkan menggelar *polling* tentang Keistimewaan DIY yang bekerja sama dengan Karang Taruna Jogja hingga pertengahan tahun 2011.

Penelitian yang mengambil objek penelitian mengenai artikel opini pembaca ini terinspirasi oleh penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Jennifer Lloyd yang berjudul *Editorializing Immigration: A Content Analysis of Op-Ed Columns* (2007). Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana isu imigrasi di Amerika dipandang oleh penulis opini melalui artikel opini pembaca di surat kabar prestisius seperti *New York Times* dan *Washington Post*.⁴ Peneliti juga menemukan penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai opini oleh Lidwina Chometa (2009) yang berjudul *Framing Opini Masyarakat tentang Polemik Jabatan Gubernur DIY dalam Koran Lokal DIY*. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana opini narasumber yang diangkat di dalam berita mengenai isu

² <http://kr.co.id/web/details> dan www.bernasjogja.com/indeks.php?content=new&cat=864 diakses pada 21.06.2011

³ <http://www.digilib.uns.ac.id/upload/dukomen/9411006200509271.pdf> diakses pada 21.06.2011

⁴ http://www.allacademic.com/meta/p203144_index.html diakses pada 10 Februari 2011

keistimewaan Yogyakarta dibingkai di dalam media lokal (SKH KR dan Harian Bernas). Penelitian yang menggunakan metode analisis *framing* ini menghasilkan data bahwa dalam proses produksi berita, narasumber (pelantun opini) yang diangkat pendapatnya di dalam media memiliki pertimbangan tersendiri. Narasumber yang digunakan KR dipakai sebagai pendorong terbitnya RUUK yang sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat DIY. Sedangkan Bernas, menggunakan pendapat narasumber untuk mempertegas sikapnya yang mendukung penetapan, sehingga diharapkan masyarakat yakin bahwa Bernas memperjuangkan penetapan.⁵

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana isu atau permasalahan keistimewaan DIY ditinjau dari segi politik dalam artikel opini di surat kabar harian lokal. Dengan demikian dapat dilihat pula bagaimana kecenderungan opini yang terbentuk.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana isu-isu politik keistimewaan Yogyakarta dari perspektif penulis artikel opini di surat kabar lokal periode Desember 2010–Januari 2011?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana isu-isu politik Keistimewaan DIY dari perspektif penulis opini artikel opini di surat kabar harian lokal periode Desember 2010 – Januari 2011.

⁵ Lidwina Chometa, *Framing Opini Masyarakat tentang Polemik Jabatan Gubernur DIY dalam Koran Lokal DIY*, (Universitas Atma Jaya, 2009) hlm.285

D. Manfaat Penelitian

- Teoritis : memberikan sumbangsih kepada pengembangan ilmu komunikasi bagi penelitian yang menggunakan studi analisis isi untuk melihat cara pandang penulis opini terhadap suatu isu yang bersifat kontroversial.
- Praktis : memperkaya pemahaman pembaca dan memberikan gambaran atau referensi kepada peneliti-peneliti mengenai penelitian opini tentang isu keistimewaan Yogyakarta dengan analisis isi pesan maupun penelitian-penelitian sejenis lainnya.

E. Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka

E.1. Konsep-Konsep Politik

Konsep politik pertama kali dipopulerkan oleh filosof Aristoteles. Politik menurut pandangannya, merupakan dimensi terpenting dalam keberadaan manusia karena politik telah memengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia. Aristoteles merumuskan politik sebagai kegiatan mengatur apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang seyogyanya tidak dilakukan⁶.

Dari awal kemunculan sampai perkembangannya hingga kini, konsep mengenai politik telah didefinisikan bermacam-macam. Ramlan Surbakti dalam bukunya *Memahami Ilmu Politik* setidaknya mencatat ada lima pandangan mengenai politik.⁷

Pertama, politik adalah usaha yang ditempuh untuk membicarakan dan mewujudkan kepentingan bersama. Pandangan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini disebut juga sebagai pandangan klasik. Pandangan ini melihat

⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1992), hlm.1

⁷ *Ibid*, hlm 2

politik sebagai sebuah asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat.⁸ Poin dari pemikiran ini terletak pada tujuan politik bahwa kebaikan bersama atau kepentingan publik merupakan pencapaian moral politik yang paling tinggi

Kedua, politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Konsep yang muncul dari pemikiran Max Weber ini mendefinisikan politik sebagai sebuah kelembagaan di mana negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan yang sah dalam wilayah tertentu.⁹ Negara merupakan organisasi yang kongkret dan memiliki kekuasaan yang sah dalam melakukan paksaan fisik, dalam hal ini negara dikaitkan dengan pelaku kekuasaan yakni pemerintah. Makna pemerintah disini berarti semua lembaga yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara termasuk pembuatan peraturan, penerapan peraturan, dan penegakan peraturan (keputusan politik).¹⁰

Ketiga, politik sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Ilmu politik, menurut Robson, dirumuskan sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, memengaruhi pihak lain ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan.¹¹ Pemikiran Robson ini menekankan bahwa politik adalah kekuasaan yang dilihat sebagai

⁸ Surbakti.*Op.cit.*,hlm.2

⁹ *Ibid.*,hlm. 4

¹⁰ *Ibid.*,hlm. 11

¹¹ *Ibid.*,hlm. 5

interaksi antara pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi atau yang satu memengaruhi sedangkan pihak lain mematuhi.

Keempat, politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Konsep ini muncul dari pemikiran para ilmuwan politik yang berpandangan bahwa politik merupakan kegiatan para elite politik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum. David Easton, dalam Ramlan Surbakti menyatakan politik sebagai *The authoritative allocation of values for a society* atau alokasi nilai-nilai secara otoritas berdasarkan kewenangan, sehingga bersifat mengikat bagi masyarakat.¹²

Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Kegiatan untuk memengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dipandang sebagai upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai. Nilai-nilai diartikan sebagai sesuatu berupa prinsip-prinsip hidup yang dianggap baik, baik bersifat abstrak (keadilan, kebebasan, keamanan, prinsip demokrasi, kemanusiaan, prinsip ke-Tuhan-an) dan bersifat konkret (sandang, pangan, fasilitas kesehatan, jaminan keselamatan, sarana transportasi komunikasi dan rekreasi).¹³ Dalam memperjuangkan upaya tersebut, seringkali terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, hingga pertentangan yang bersifat fisik. Hal tersebut diatas yang dilakukan guna mempertahankan dan mendapatkan nilai-nilai disebut konflik. Menurut pandangan konflik, konflik dinyatakan sebagai embrio atau gejala-gejala yang serba hadir di masyarakat, termasuk dalam proses-proses

¹² Surbakti. *Op.cit.*, hlm.6

¹³ *Ibid.*, hlm.7

politik.¹⁴ Proses realisasi UUK Yogyakarta yang menjadi perdebatan di masyarakat dipicu ketidaksepahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan warga Yogyakarta. Perbedaan pendapat dipahami sebagai konflik dari beberapa pihak yang sama-sama berupaya untuk mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai yang selama ini dikuasai.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep-konsep politik diatas, Ramlan merumuskan politik menjadi satu konsep yakni, interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu.¹⁵ Berkaitan dengan isu keistimewaan Yogyakarta, interaksi antara pemerintah dan masyarakat dapat dilihat dari aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan masyarakat Yogyakarta, adanya kelompok-kelompok masyarakat yang menyatakan aspirasi dukungan mereka kepada pihak Keraton, dialog antara Sultan, pemerintah pusat dan warga Yogyakarta, interaksi para akademisi dengan pemerintah dalam menyumbang pemikiran-pemikiran mengenai jalan tengah permasalahan kesitimewaan DIY dan lain sebagainya. Bentuk interaksi diatas dilakukan dalam rangka mencapai sebuah keputusan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (UU Keistimewaan) demi kebaikan bersama atau kepentingan umum.

E.2 Opini

Opini merupakan proses yang menggabungkan pikiran, perasaan dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan

¹⁴ Surbakti.*Op.cit.*,hlm.8

¹⁵ *Ibid.*,hal 10

yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab atas dicapainya ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, perbantahan dan perselisihan pendapat tentang apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.¹⁶ Opini atau pendapat didefinisikan sebagai jawaban terbuka terhadap suatu persoalan atau isu, rangsangan, atau situasi yang mengemukakan beberapa pertanyaan yang dipermasalahkan yang diajukan secara tertulis ataupun lisan.¹⁷

Opini lebih lanjut, dinyatakan sebagai tanggapan (respon) aktif terhadap rangsangan di mana tanggapan tersebut disusun melalui intepretasi personal yang diturunkan dari dan turut membentuk citra. Citra digambarkan sebagai segala sesuatu yang telah dipelajari oleh manusia yang relevan dengan situasi dan dengan tindakan yang bisa terjadi di dalamnya.¹⁸ Dan Nimmo menambahkan, di dalam citra terkandung komponen-komponen yang senantiasa berubah sesuai dengan berubahnya pengalaman.

”Di dalam citra tercakup seluruh pengetahuan seseorang (kognisi), baik benar ataupun keliru, semua preferensi (afeksi) yang melekat kepada tahap tertentu peristiwa yang menarik atau menolak orang tersebut dalam situasi itu, dan semua pengharapan (konasi) yang dimiliki orang tentang apa yang mungkin terjadi jika seseorang berperilaku dengan cara berganti-ganti terhadap objek di dalam situasi tersebut.”¹⁹

Dari uraian di atas, maka citra adalah kecenderungan seseorang yang tersusun dari pikiran, perasaan dan kesudian. Demikian pula dalam pembentukannya, opini ditandai dengan adanya respon aktif masyarakat Yogyakarta khususnya terhadap isu keistimewaan DIY. Isu keistimewaan DIY ini

¹⁶ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, (Bandung: Penerbit Remadja Karya CV, 1989), hlm. 3

¹⁷ Astrid Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1974), hlm.15

¹⁸ Nimmo, *Op.cit.*, hlm. 9

¹⁹ *Ibid.*, hlm.5

menimbulkan perdebatan di masyarakat dan menjadi embrio lahirnya opini. Penulis opini menggabungkan pikiran, perasaan dan harapan atau kesudian atas persoalan Keistimewaan Yogyakarta yang dituangkan dalam tulisan dalam halaman opini surat kabar.

Opini merefleksikan sebuah organisasi yang kompleks yang terdiri dari komponen-komponen yang saling melingkupi, antara lain, komponen kepercayaan, nilai dan pengharapan personal.²⁰

1. Kepercayaan

Komponen kepercayaan atau keyakinan ditandai dengan adanya persepsi hubungan antara dua hal atau antara sesuatu dengan karakteristiknya. Sebagai contoh, hubungan dua hal yakni sosok Sri Sultan dengan sifat kenegarawan. Sebagian masyarakat akan mempersepsi bahwa sifat kenegarawan melekat pada sosok Sri Sultan namun sebagian masyarakat yang lain mungkin tidak percaya. Melalui contoh kasus tersebut, maka kepercayaan dapat diasosiasikan dengan aspek kognitif, atau pikiran dari citra dan intepretasi personal. Di dalam komponen kepercayaan ini terkandung sesuatu yang disebut Nimmo sebagai kredulitas (*credulity*), subyek yang percaya dan tidak percaya.²¹

2. Nilai

Nilai adalah preferensi yang dimiliki seseorang terhadap tujuan tertentu atau cara tertentu melakukan sesuatu. Seperti yang telah disinggung di atas mengenai citra, preferensi seseorang erat kaitannya dengan aspek afektif atau perasaan, citra personal yang digunakan untuk menilai diri sendiri dan lingkungannya. Nilai yang

²⁰ Nimmo.*Op.cit.*,hlm.12

²¹ *Ibid.*

mencakup preferensi atau pilihan bervariasi baik arah, intensitas maupun pentingnya nilai-nilai tertentu bagi seseorang. Misal, arah opini masyarakat tentang mekanisme kepemimpinan DIY apakah mendukung-menolak pemilihan, sedangkan intensitasnya dikategorikan kuat, sedang dan lemah.²²

3. Pengharapan

Pengharapan personal berkaitan dengan aspek konatif, atau kecenderungan, dari citra personal dan proses interpretatif. Setiap orang akan bertindak dengan cara tertentu untuk memperoleh tujuan yang dianggap bernilai, dan di dalam proses mewujudkan hal tersebut individu membuat perkiraan-perkiraan di masa depan. Seseorang akan merumuskan pengharapannya dengan menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang untuk menaksir kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Pengharapan personal ini dinilai sebagai komponen yang paling penting dalam politik. Orang sering mempertimbangkan peristiwa politik atau performa pemimpin berdasarkan pada sesuatu yang diharapkan terjadi.²³ Jika dikaitkan dengan wacana keistimewaan Yogyakarta, pengharapan-pengharapan personal akan banyak ditemui dalam masyarakat, seperti bagaimana peristiwa sejarah terbentuknya DIY dihubungkan dengan masa sekarang, taksiran dan pengharapan di masa depan tentang berlangsungnya kepemimpinan DIY akan berbeda satu sama lain.

Opini, selain merupakan sebuah cerminan dari organisasi komponen-komponen, juga memiliki karakteristik-karakteristik yang menandainya sehingga

²² Nimmo, *Op.cit.*, hlm.15

²³ *Ibid.*, hlm.17

disebut sebagai opini. Karakteristik dalam kategori opini personal antara lain 1) isi opini 2) arah opini 3) intensitas opini.²⁴

Pertama, opini mempunyai isi karena opini adalah tentang sesuatu. Isu, permasalahan, fenomena, konflik maupun kabar yang dipublikasikan dan menjadi pergunjingan di tengah masyarakat menjadi muatan atau isi dalam opini tersebut. Jadi, opini merupakan respon aktif dari masyarakat tentang sesuatu. *Kedua*, opini memiliki arah. Dalam opini personal, interpretasi pribadi terhadap sesuatu secara alami akan mengarah pada sebuah keputusan, seperti percaya-tidak percaya, mendukung-tidak mendukung. Sama halnya dengan isu keistimewaan DIY, interpretasi personal entah mengarah atau diarahkan akan mengerucut pada keputusan-keputusan seperti mendukung-tidak mendukung RUUK DIY, dan lain sebagainya.²⁵

Ketiga, opini memiliki intensitas. Intensitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keadaan tentang tingkatan atau ukuran.²⁶ Intensitas dalam konteks opini merupakan tingkatan atau ukuran ketajaman opini dalam tingkatan kuat, sedang atau lemah. Semakin kuat opini, isu yang dipermasalahkan akan mengutub kepada keputusan-keputusan final.

Citra personal dan opini pribadi dihubungkan oleh interpretasi personal. Melalui interpretasi tersebut, individu memperhitungkan, menyusun dan bertindak atau memberikan respon terhadap sesuatu yang paling menonjol. Nimmo

²⁴ Nimmo, *Op.cit.*, hlm.29

²⁵ *Ibid.*

²⁶ <http://kamusbahasaIndonesia.org/intesitas> diakses pada 14/03/2011

memaparkan ada beberapa hal yang dipertimbangkan orang dalam merumuskan opini politik pribadinya dan mengungkapkan di depan umum²⁷ :

- a. Keadaan internal: mengacu pada kepribadian, kecenderungan, sikap, emosi, keinginan, kebutuhan, suasana, motivasi, emosi, kebiasaan dan faktor lain yang bersifat psikologis atau fisiologis.
- b. Karakteristik demografi: mencakup usia, jenis kelamin, etnik, wilayah tempat tinggal, kelas sosial (pendidikan, pekerjaan, pendapatan) dll.
- c. Karakteristik sosial: kelompok yang menjadi identifikasinya. Melalui kelompoknya tersebut, seseorang dipandang dan dihormati sebagai contoh tokoh masyarakat.
- d. Pertimbangan resmi/formal: lembaga pemerintahan, hukum, peraturan, prosedur, pengaturan, dan segala sesuatu yang dapat dikategorikan ke dalam proses interpetatif daam merumuskan opini orang.
- e. Preferensi partisipan: banyak yang mempunyai preferensi yang lama dan tangguh terhadap partai politik, ideology atau tujuan dan semua ini dapat diperhitungkan melalui intepretasi.
- f. Komunikasi: sumber komunikasi dan persepsi personal terhadap sumber-sumber komunikasi, media yang digunakan, dan teknik persuasif.
- g. Objek politik: seseorang mengungkapkan opininya tentang sesuatu, termasuk orang, peristiwa, isu, gagasan, pernyataan, usul atau objek lain yang menstimuli seseorang untuk menyatakan pendapatnnya.

²⁷ *Ibid.*, hlm.10

- h. Setting politik: substansi dari opini seseorang adalah objek, di mana objek tersebut muncul dalam setting waktu dan ruang. Setting seringkali menjadi latar belakang dari suatu objek, bahkan dianggap lebih penting dari pada objek itu sendiri.
- i. Pilihan: adalah segala pilihan-pilihan yang dapat diungkapkan di dalam opini (mendukung, menentang, netral, tidak memberikan jawaban, tidak beropini).

E.3 Rubrik Opini (*Editorial Page*)

Surat kabar tak hanya menyajikan fakta-fakta yang tertuang di setiap halamannya. Fakta atau berita, opini dan bahkan iklan menjadi komponen-komponen penting yang memiliki peran dalam industri media. Media sebagai sebuah institusi diharapkan mempunyai pandangan atau pendirian tentang sesuatu permasalahan sehingga tidak semata memaparkan fakta-fakta. Seperti yang dikatakan Jakob Oetama dalam buku *Bagaimana Mempertimbangkan Artikel Opini untuk Media Massa*, sebagai berikut:

''melalui artikel opini, perbedaan pendapat masyarakat, aspirasi dan persoalan masyarakat diberi saluran untuk dinyatakan dan saling dikaji dan diuji. Dengan begitu, khalayak diajak belajar menghargai perbedaan dan mengembangkannya sebagai sumber konstruktif untuk memajukan kesejahteraan rakyat. ''²⁸

Dari maksud di atas, Saur Hutabarat dan Susanto Pudjomartono sebagai salah dua penulis buku di atas, menyimpulkan bahwa halaman opini disediakan pers sebagai bagian dari pelaksanaan peran, fungsi dan tanggung jawab pers kepada masyarakat, dalam arti pers turut menjalankan tugas demokratisasinya dengan menyediakan forum untuk dialog.²⁹ Menyadari akan pentingnya ide,

²⁸ Arief Budiman (et-al), *Bagaimana Mempertimbangkan Artikel Opini Untuk Media Massa*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius bekerja sama dengan LP3Y, 1995), hlm.31

²⁹ *Ibid.*

gagasan atau opini, surat kabar merasa berkewajiban untuk memberi tempat bagi opini dan gagasan melalui hadirnya rubrik opini (*opinion page*).

Rubrik opini atau *opinion page* ditempatkan tersendiri dari rubrik-rubrik lain baik berita maupun iklan. Hal tersebut dikarenakan *opinion page* murni berisi opini, pendapat, gagasan yang pasti mengandung subyektivitas, yang bertolak belakang dengan berita atau fakta yang seharusnya obyektif. Dengan demikian, opini dan fakta dapat dibedakan mengingat fakta dan opini seringkali tumpang tindih dan bercampur baur.³⁰ Bond mengungkapkan, halaman editorial berisi ekspresi pendapat institusi media serta pandangan-pandangan di luar media.

This special page, the editorial page, consists usually of the paper's own opinion, expressed in its editorial and graphically in its cartoon, and also the opinion of others. These outside opinions may be the ideas of the paper's readers, the familiar "Letters to Editor", or shot excerpts from the opinion column of other papers under some such head as "What the Press Saying".³¹

Opinion page umumnya berisi pendapat surat kabar berupa tajuk rencana, kartun atau ilustrasi atau karikatur (opini), di samping opini masyarakat luas yang tertuang dalam bentuk artikel opini. Artikel opini disebut juga *Op-Ed Column* (*Opposite of Editorial*). Op-Ed dalam surat kabar didefinisikan sebagai sebuah artikel yang berisi tentang opini yang terdapat dalam rubrik opini di surat kabar yang juga merepresentasikan sudut pandang penulis disertai dengan identitas pengarang (*byline*). Op-Ed berbeda dengan editorial atau tajuk rencana yang merupakan perwakilan sudut pandang dari redaksi surat kabar sehingga tidak

³⁰ Lihat bab "Menukik ke Dalam Artikel Opini" dalam *Bagaimana Mempertimbangkan Artikel Opini untuk Media Massa* (Penerbit Kanisius, 1995)

³¹ F. Fraser Bond, *An Introduction to Journalism*, Second Edition, (USA: Mac Milani, 1961), hlm. 211

disertai dengan identitas pengarang. Disebut *Opposite of Editorial* karena diisi dengan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan suara editorial. Ini didasarkan bahwa pandangan luar yang berbeda dengan suara pengelola surat kabar juga layak diberi tempat.³²

Beberapa definisi mengenai artikel opini dikemukakan pula antara lain oleh Sa'ud dalam Kuncoro, artikel opini adalah tulisan lepas yang berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kontroversi dengan tujuan untuk memberitahu (informatif), memengaruhi dan meyakinkan atau juga bisa menghibur bagi pembacanya (bersifat *recreative*). Sedangkan menurut Komaidi, artikel opini biasanya menekankan pada pendapat pribadi penulis yang memperkuat argumen logis dan pemikiran kritis terhadap suatu masalah aktual.³³

Tjuk Swarsono menyebutkan bahwa artikel adalah karangan yang menampung gagasan dan opini penulis, bisa merupakan gagasan murni atau memungut dari sumber lain seperti, referensi, perpustakaan, pernyataan-pernyataan orang lain dan sebagainya³⁴.

Artikel opini umumnya diterbitkan oleh koran atau majalah. Karena tempatnya yang terbatas, maka artikel pada umumnya tidak terlalu panjang yakni hanya sekitar 4-6 halaman kuarto spasi ganda. Artikel opini diletakkan di halaman tengah bersama tajuk rencana dan surat pembaca. Artikel opini biasanya ditulis dengan gaya bahasa ilmiah populer karena tulisan ini ditujukan bagi pembaca

³² Sam G. Riley, *The American Newspaper Columnist*, (London: Praeger Publishers, 1998), hlm. 79-81

³³ Mudrajat Kuncoro, *Mahir Menulis*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 32

³⁴ Totok Djuroto, Bambang Suprijadi, *Menulis Artikel dan Karya Ilmiah*, (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 4

umum dari berbagai kalangan. Sebagian besar media massa cetak menerbitkan artikel opini setiap hari kecuali hari Minggu dan umumnya memuat beberapa artikel opini dalam satu hari.³⁵

E.4 Model Komunikasi dalam Pengkajian Opini

Opini merupakan salah satu fenomena komunikasi. Fenomena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah.³⁶ Fenomena umumnya disebut juga sebagai gejala, sehingga opini –dalam konteks opini personal- merupakan peristiwa yang menjadi tanda-tanda terjadinya sebuah proses komunikasi.

Untuk memahami opini sebagai salah satu fenomena komunikasi, ada beberapa model komunikasi yang dapat digunakan. Model merupakan representasi suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut.³⁷ Menurut Sereno dan Mortensen dalam Mulyana (2007), model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi.³⁸

Gerhard J. Hanneman dan William J. McEwen membuat tipologi model komunikasi, ada beberapa tipe model antara lain model mental, model simbolik dan model fisik. Model simbolik terbagi menjadi dua, yakni model verbal dan

³⁵ Kuncoro, *Op.cit*, hlm. 67-68

³⁶ Referensi: <http://kamusbahasaIndonesia.org/fenomena#ixzz1ZyEds29C> akses pada 24/09/11

³⁷ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.131

³⁸ *Ibid.*, hlm. 138

model matematik.³⁹ Berkaitan dengan penelitian opini, maka model verbal merupakan model yang paling relevan sebab model ini dinyatakan dengan kata-kata, dirumuskan dalam kalimat-kalimat, meskipun bentuknya masih sangat sederhana. Model-model komunikasi yang termasuk dalam model ini seperti model SMCR David Berlo dan model linier Lasswell.

Model SMCR dikemukakan oleh David K. Berlo pada tahun 1960. SMCR merupakan singkatan dari beberapa komponen antara lain *Source* (sumber), *Message* (pesan), *Channel* (saluran) dan *Receiver* (penerima). Sumber adalah pihak yang menciptakan pesan baik perseorangan atau sebuah kelompok, pesan adalah terjemahan gagasan ke dalam model simbolik seperti bahasa atau simbolik, saluran merupakan medium dimana pesan disalurkan, sedangkan penerima adalah pihak atau orang yang menjadi sasaran komunikasi.⁴⁰

Dalam model Berlo dikenal pula istilah penyandi (*encoder*) dan penyandi-balik (*decoder*). Penyandi atau enkoder bertanggungjawab mengekspresikan maksud sumber dalam bentuk pesan. Dalam proses penyandian tersebut, penerima membutuhkan penyandi-balik untuk menerjemahkan pesan yang diterima. Mulyana (2007) menyatakan umumnya penyandi balik atau dekoder merupakan keterampilan inderawi individu dalam menerima pesan.⁴¹

Saluran dalam konteks komunikasi massa adalah media massa elektronik dan cetak, seperti televisi, radio, surat kabar, buku dan majalah. Model Berlo ini juga melukiskan beberapa faktor pribadi yang memengaruhi proses komunikasi

³⁹ *Ibid.*, hlm.135

⁴⁰ Mulyana, *Op.cit.*, hlm.162

⁴¹ *Ibid.*

antara lain, keterampilan berkomunikasi, pengetahuan, sistem sosial dan lingkungan budaya sumber dan penerima.⁴²

Model komunikasi Lasswell berupa ungkapan verbal, yakni *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect*. Dari kalimat tersebut maka, dapat diturunkan komponen-komponen komunikasi yang terdiri dari, sumber (*who*) yang erat kaitannya sebagai pengendali pesan, pesan (*says what*), saluran komunikasi (*in which channel*), penerima (*to whom*), dan unsur pengaruh (*with what effect*). Model yang dikemukakan pada 1948 ini menyatakan bahwa tidak semua proses komunikasi bersifat dua arah, melalui model linier ini Lasswell mengungkapkan bahwa komunikasi dapat berupa suatu aliran yang lancar disertai umpan balik yang terjadi antara pengirim dan penerima.⁴³

Dalam pengamatan Lasswell, pada masyarakat kompleks banyaknya informasi yang masuk akan disaring oleh pengendali pesan seperti editor dalam media massa cetak, penyensor dan propagandis yang menerima pesan dan kemudian menyampaikannya kembali disertai perubahan-perubahan ataupun penyimpangan. Menurut Lasswell, dalam Deddy (2007), menyimpulkan bahwa sangat penting bagi masyarakat untuk mencari, menemukan dan mengontrol faktor-faktor yang dapat memengaruhi efisiensi komunikasi.⁴⁴

E.5 Media dan Komunikasi Politik

Komunikasi politik, menurut Suwardi, merupakan suatu penyampaian pesan-pesan politik dari suatu sumber kepada sejumlah sasaran dengan tujuan pasti. Pendapat lain dari McQuail, dalam komunikasi politik hal yang penting

⁴² *Ibid.*

⁴³ Mulyana, *Op.cit.*, hlm.148

⁴⁴ *Ibid.*

adalah pesan-pesan politik yang dilihat dari sisi sumber maupun bentuknya. Pesan komunikasi tersebut bervariasi, bisa dalam bentuk berita atau informasi, pernyataan yang berkaitan dengan sistem nilai, kepercayaan dan pendapat, bisa dalam bentuk interpretasi dan kritik ataupun pesan yang mempunyai relevansi dengan politik yang terdapat pada karya tulis fiksi ataupun karya tulis kreatif.⁴⁵

Media massa telah lama digunakan terutama sebagai saluran komunikasi politik. Keberadaannya tidak saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai ambisi-ambisi politik, akan tetapi media massa juga mempunyai kemampuan untuk menyeleksi apa saja yang dianggap tidak penting dan apa saja yang perlu diberitakan. Media cetak –sebagai salah satu bentuk media massa- tak hanya sekedar sebagai saluran pendidikan politik bagi warganya, secara makro fungsinya turut serta mencerdaskan bangsa.⁴⁶

Peran media massa sebagai saluran dalam proses komunikasi politik memiliki keterkaitan yang kuat dengan sifat maupun fungsi media massa secara umum. Seperti yang dikatakan Suwardi bahwa sifat umum dari media massa adalah khalayaknya yang bercirikan majemuk dan tidak terbatas. Walaupun pada umumnya pengaruh media massa adalah tidak langsung, dalam arti tidak serta merta khalayak akan menentukan sikap politiknya (Pro-Kontra Pemilihan/Penetapan) karena diterpa opini, dan terjadi dalam tenggang waktu tertentu, namun dampak yang dirasakan sangat besar.⁴⁷

⁴⁵ Harsono Suwardi, *Peranan Pers dalam Politik Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm.43

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.16

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.112

Dalam praktek kehidupan pers sehari-hari, berlaku hubungan pers dan pemerintah yang sifatnya *simbiosis-mutualisme*. Hal ini mendorong pers di Indonesia untuk mencoba saling menghidupkan antara kepentingan pers di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Hubungan tersebut tercermin dalam tulisan-tulisan dalam rubrik redaksi baik tajuk rencana maupun tulisan artikel opini dari penulis lepas atau di luar institusi surat kabar tersebut. Semua tulisan tersebut akan melalui proses yang disebut *self-censorship* dan *gate keeper* atau penjaga gawang akan cukup berperan di dalamnya.⁴⁸ Dengan adanya isu kontroversial yang menimbulkan konflik terkait beberapa pihak tugas-tugas penjaga gawang akan mengarah kepada keputusan-keputusan tertentu. Dampak dari tugas *self-censorship* yakni munculnya tulisan-tulisan tajuk yang bernada lebih positif terhadap suatu isu yang kontroversial. Namun berbeda keadaannya apabila isu-isu kontroversial tersebut ditulis oleh para pakar ataupun masyarakat luas dalam rubrik artikel. Karena itu pula, akan sering terjadi bahwa tulisan-tulisan yang dituangkan dalam bentuk artikel semasa kampanye berlangsung akan lebih berani.⁴⁹ Meskipun demikian, artikel semacam ini pada umumnya juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pendapat surat kabar itu sendiri.⁵⁰

Mc Quail menjelaskan bahwa faktor politis akan sangat berdampak bagi institusi media.

Faktor yang bersifat politis akan berkenaan dengan pelbagai kecenderungan otoritas eksternal untuk membatasi atau mengatur media yang dapat bersikap konformis atau kritis terhadap otoritas yang mapan. Ada tidaknya kontrol biasanya berkaitan dengan variabel lainnya, kadar pemusatan perhatiannya terhadap kekuasaan negara. Hal tersebut

⁴⁸ Suwardi, *Op.cit.*, hlm. 225

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 85

umumnya tergantung pada fungsi yang lazim, semakin besar keterlibatan media dalam gelanggang politik semakin besar pula perhatian pemegang kekuasaan dan pesaingnya terhadap media tersebut.⁵¹

Dengan demikian media menggunakan potensinya untuk mengkritik ataupun tidak tergantung pada kondisi dan situasi politik di mana media itu hidup, serta pilihan pendirian yang ditentukan oleh media itu sendiri.

Kaitannya dengan kekuasaan, dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam Suwardi menambahkan bahwa pada umumnya media dimanapun dalam hal-hal tertentu, apabila dekat dengan pusat kekuasaan, ada kecenderungan besar akan bersifat reaktif dan terkadang vokal terhadap penguasa. Hal tersebut berbeda dengan pers (media) daerah yang letaknya jauh dari pusat kekuasaan ada kecenderungan bersikap suportif kepada penguasa. Namun gejala ini dimungkinkan muncul bila hubungan antara pers dan pemerintah dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena makin dekatnya media dengan para pengambil keputusan sehingga memungkinkan mendapatkan sumber-sumber informasi. Sedangkan pers daerah cenderung bersikap positif, selain karena posisinya yang jauh dari pusat kekuasaan, pers daerah perlu menjaga eksistensinya, sehingga harus menjaga keseimbangan hubungan dengan pemerintah.⁵²

Dalam kehidupan pers, faktor-faktor seperti modal, visi ataupun orientasi akan banyak memberikan pengaruh kepada kebijakan redaksional surat kabar. Dalam beberapa kasus yang ditemui, pers daerah seringkali menemui kendala dalam masalah permodalan (*financial*), distribusi dan manajemen atau

⁵¹ Denis Mc Quail, *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), hlm. 20

⁵² Suwardi, *Op.cit.*, hlm. 225

pengelolaan yang menjadi penghambat bagi berkembangnya pers daerah.⁵³ Pertimbangan akan bagaimana secara ekonomi pers daerah terjamin menjadi fokus tersendiri di media massa daerah. Visi dan orientasinya tergantung pada kondisi daerahnya, bagaimana pers daerah menjadi sarana pemenuh informasi, ide dan wadah aspirasi masyarakat setempat mengenai peningkatan sosial, ekonomi maupun potensi kebudayaan.

F. Kerangka Konsep

Artikel opini merupakan sarana bagi masyarakat yang berada di luar institusi media untuk menyatakan pendapat atau gagasan tentang apapun yang berkaitan dengan persoalan publik atau kepentingan umum. Seperti yang dikemukakan Dan Nimmo (1989) bahwa opini merupakan gabungan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan secara pribadi terhadap kebijakan yang dibuat pejabat pemerintah dalam situasi yang mengandung konflik.⁵⁴

Perspektif, menurut Rahmat, disebut juga sebagai pendekatan. Ada dua sifat perspektif, yaitu yang bersifat membatasi pandangan dan selektif. Berdasar perspektif itu, seseorang memerhatikan, mengintepretasi dan memberi stimuli dari realitas yang ditemui serta mengabaikan stimuli lainnya, kemudian berperilaku berdasarkan pemahamannya lewat perspektif tersebut.⁵⁵ Sehingga realita yang ditangkap merupakan realita yang telah dipilih dari aspek tertentu, termasuk opini salah satunya, yang merupakan gambaran pikiran dari penulis-penulis opini terhadap isu keistimewaan Yogyakarta.

⁵³ Astrid Susanto, *Komunikasi Massa*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1982), hlm.1.46

⁵⁴ Nimmo, *Loc.cit.*

⁵⁵ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.50

Dinamika keistimewaan DIY mengalami pasang surut lebih dari sepuluh tahun terakhir, isu ini kembali diperbincangkan ketika muncul stimulus berupa pernyataan kontroversial Presiden SBY. Perihal yang diperdebatkan adalah masih seputar dimensi politik kepemimpinan Yogyakarta. Perumusan UU Keistimewaan masih terjebak dalam permasalahan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, baik mekanisme pemilihan langsung, penetapan, dan beberapa alternatif yang berusaha diciptakan sebagai jalan tengah persoalan tersebut serta hal-hal lainnya yang sifatnya politis. Terfokusnya permasalahan ini pada aspek politis turut memengaruhi pandangan masyarakat termasuk pandangan politik penulis opini tertuang dalam artikel opini yang terbit di koran-koran.

Isu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai masalah yang dikedepankan atau untuk ditanggapi.⁵⁶ Nimmo (1989) menyebutkan bahwa isu berkaitan dengan isi informasi. Dalam menanggapi isi informasi, setiap individu memilih alternatif saluran komunikasi dan cara-cara yang berbeda. Perubahan pandangan mengenai cara seseorang menanggapi isu politik dapat berubah seiring dengan adanya riset-riset mengenai persoalan tersebut.⁵⁷

Menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Abdur Rozaki dkk (IRE Pers) mengenai keistimewaan Yogyakarta, mengungkap tiga isu utama dalam pembahasan Keistimewaan DIY, antara lain 1) Posisi keraton di dalam konstelasi politik modern 2) Permasalahan politik pertanahan dan 3) Meletakkan

⁵⁶ www.kamusbesarbahasaIndonesia.org/isu diakses pada 16/1/12

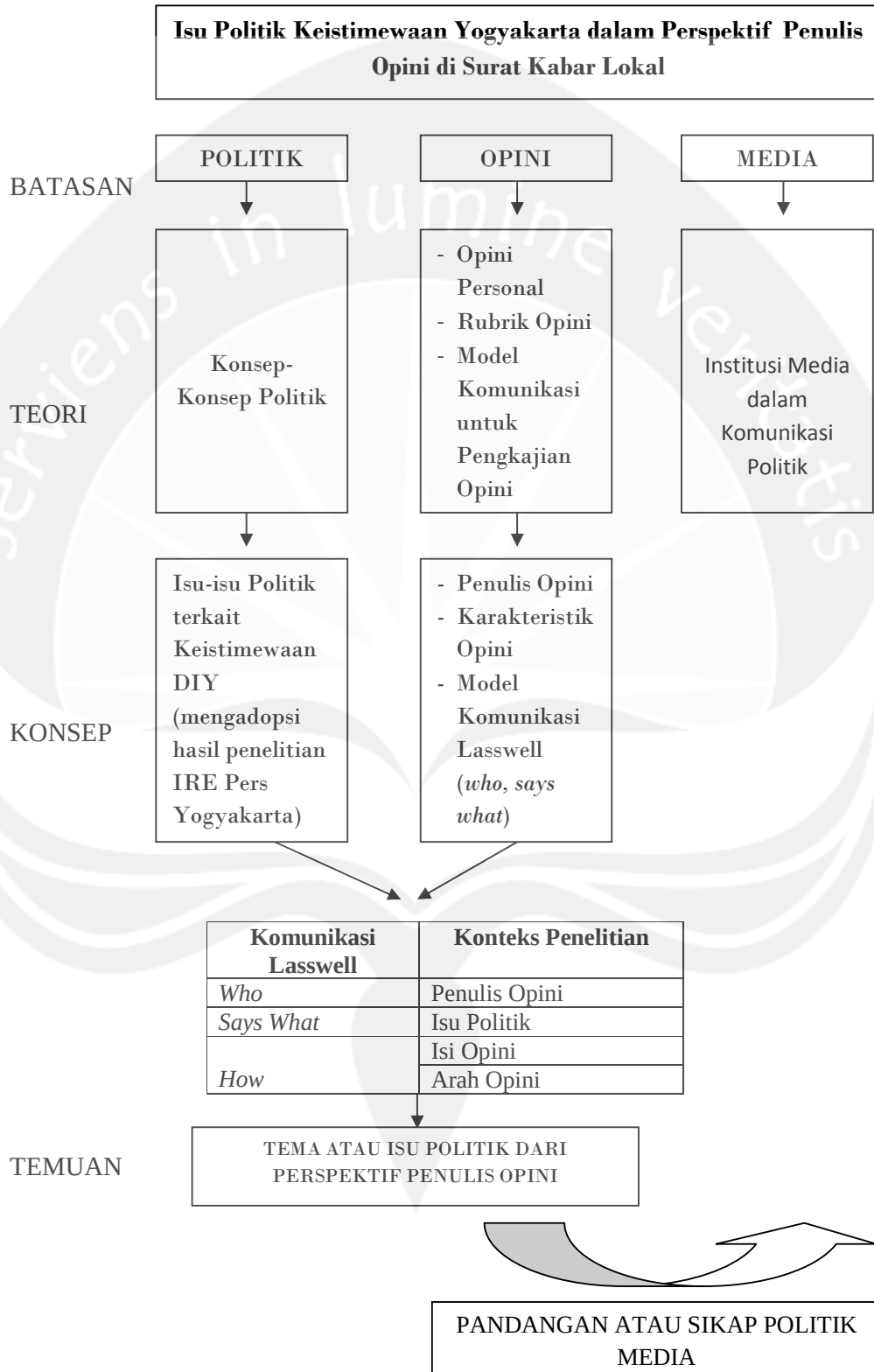
⁵⁷ Nimmo, *Op.cit.*, hlm.172

semangat desentralisasi dalam konteks keistimewaan DIY. Selain isu di atas, beberapa isu lain seperti isu budaya, pendidikan dan pariwisata hanya menjadi isu-isu turunan yang merupakan derivasi dari isu-isu pokok tersebut.⁵⁸

Berkaitan dengan penelitian opini, untuk mengkaji penelitian opini sebagai penelitian komunikasi, penulis menggunakan model komunikasi Lasswell yang diterangkan sebagai berikut: *Who* (siapa) *says what* (bicara apa) *in which channel* (media) *to whom* (kepada siapa) *with what effect* (bagaimana efeknya). Karena penelitian ini merupakan penelitian analisis teks (pesan), penulis hanya mengambil beberapa komponen komunikasi Lasswell antara lain *who* dan *says what*. Penulis menambahkan unsur *how* (bagaimana) sehingga menjadi tiga komponen. (lihat Skema 1.1)

⁵⁸www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/122764-T%2026183.pdf diakses pada 30/09/2011

Skema 1.1 Kerangka Konsep



Untuk mengkaji penelitian ini lebih lanjut, penulis membuat batasan-batasan melalui konsep di atas yang berupa unit analisis dan kategorisasi sebagai berikut.

1. Penulis Opini

Penulis artikel opini dalam *opinion page* surat kabar adalah siapa pun atau semua khalayak media yang menulis dan mengirimkan artikelnya kepada institusi media tanpa melihat perbedaan golongan atau kelompok tertentu. Setiap individu berhak menyuarakan aspirasinya dalam bentuk artikel tanpa dibatasi strata ataupun kelas sosial. Penulis opini bisa berasal dari akademisi, pejabat pemerintah, pegawai non-pemerintahan (swasta), tokoh masyarakat maupun anggota masyarakat yang tidak memiliki otoritas apapun.

2. Isu Politik

Pandangan politik mengadopsi pemikiran atau hasil penelitian dari IRE (*Institute of Research and Empowerment*) Pers Yogyakarta, mengenai isu-isu pokok dalam kajian Keistimewaan DIY. Isu-isu utama berada pada ranah politik antara lain, *pertama* bagaimana posisi keraton dalam konstelasi politik modern, hal tersebut mengacu pada keberadaan keraton dari sisi historis yang telah melakukan proses integrasi dengan NKRI, *kedua*, permasalahan politik pertanahan, diberlakukannya praktek kepemilikan tanah di Jogja yang masih didominasi pola atau model yang selama ini digunakan kerajaan yakni segala sesuatu di dalam kerajaan adalah milik raja dan beberapa tanah di luar yang juga dimiliki raja dapat dimiliki rakyat dengan sistem pemberian. dan *ketiga*, bagaimana meletakkan semangat desentralisasi dalam konteks keistimewaan DIY,

sehingga dalam substansi keistimewaan DIY terkandung kontrak sosial baru yang membingkai semangat berbasis masyarakat diperjelas melalui otonomi daerah.

3. Isi dan Arah Opini

Opini memiliki isi, karena opini adalah tentang sesuatu. Opini merupakan pendapat, gagasan, ide sebagai cermin pemikiran penulis opini yang dinyatakan dengan kalimat-kalimat yang bersifat subyektif. Pernyataan atau kalimat tersebut dapat berupa kritik, dukungan, pujian, saran, himbauan maupun harapan. Sedangkan arah opini adalah kecenderungan atau orientasi opini, dalam konteks penelitian maka arah opini ini berupa mendukung penetapan-menolak penetapan-netral.

Tabel 1.1. Unit Analisis dan Kategorisasi

Unit Analisis	Kategorisasi
Penulis Opini	• Pengamat • Akademisi • Pejabat Pemerintah • Pegawai Non-pemerintahan • Para Ahli • Masyarakat
Isu Politik	• Keberadaan Keraton di dalam konstelasi politik • Permasalahan politik pertanahan • Desentralisasi dalam konteks keistimewaan DIY
Isi Opini	• Kritik • Pujian • Saran (Harapan) • Gabungan kritik-pujian • Gabungan pujian-saran • Gabungan saran-kritik
Arah Opini	• Pro Penetapan • Kontra Penetapan • Netral

G. Definisi Operasional

Berdasar kerangka konsep di atas, peneliti kemudian menurunkannya menjadi unit analisis dan kategorisasi yang digunakan sebagai acuan penelitian. Untuk memperjelas acuan-acuan yang digunakan untuk penelitian maka perlu adanya definisi operasional dari setiap kategori sebagai berikut:

G.1. Penulis Opini

- a. **Pengamat atau pemerhati.** Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁵⁹ pengamat berarti orang yang melakukan pengawasan terhadap suatu perbuatan, peristiwa, keadaan, kegiatan dalam bidang-bidang tertentu, seperti pengamat politik, pengamat intelijen, pengamat pendidikan, pengamat musik, pemerhati masalah sosial dan budaya, pemerhati anak, pemerhati masalah kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya.
- b. **Akademisi.** Kategori akademisi mencakup antara lain mahasiswa atau pelajar, dosen atau guru atau pengajar, guru besar, alumnus, pejabat dalam institusi pendidikan dan peneliti.
- c. **Pejabat Pemerintah.** Penulis opini dalam kategori ini adalah orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan seperti anggota DPR/MPR, menteri, pemerintah daerah, pegawai yang bekerja di departemen baik tingkat pusat maupun daerah.
- d. **Pegawai non-pemerintah.** Penulis opini dalam kategori ini antara lain pegawai dalam institusi swasta, organisasi-organisasi non-profit, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pengusaha.

⁵⁹ <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada 29/09/2011

e. **Para Ahli**, antara lain seperti sejarawan, budayawan, sastrawan, seniman, sosiolog dan lain-lain.

f. **Masyarakat**, adalah kelompok yang tidak teridentifikasi dalam kelompok di atas, seperti warga Yogyakarta, pensiunan atau purnawirawan.

G.2 Isu Politik

a. Keberadaan Keraton di dalam konstelasi politik

Dalam kategori ini, keistimewaan DIY dititikberatkan pada keberadaan Keraton dan fakta sejarah berintegrasinya Yogyakarta ke dalam NKRI merupakan basis keistimewaan DIY. Pandangan ini ditandai dengan munculnya wacana mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, sehingga erat kaitannya dengan pembahasan demokrasi, sistem kepemimpinan dan pemerintahan DIY. Contoh:

"Dengan alasan penegakan demokrasi, Pemerintah Pusat mengusulkan konsep bahwa Sultan dan Paku Alam berkedudukan sebagai gubernur utama dan wakil gubernur utama. Sedangkan gubernur dan wakil gubernur DIY harus dipilih melalui PemiluKada". (SKH Kedaulatan Rakyat, 13 Desember 2010)

b. Permasalahan politik pertanahan

Kategori ini menitikberatkan permasalahan keistimewaan DIY pada politik pertanahan di mana praktek-praktek kepemilikan tanah di Jogja masih didominasi pola atau model yang selama ini digunakan kerajaan beserta peraturan perundang-undangnya. Contoh, seperti paragraf pada salah satu artikel sebagai berikut:

Presiden juga menyinggung perlakuan khusus dan peran istimewa bagi pewaris Kesultanan dan Pakualaman secara permanen. Dan tak kalah penting, kepala negara juga menyinggung masalah pengelolaan tanah-kebutuhan dasar dan aset yang sangat berharga bagi sebagian besar rakyat Indonesia, termasuk Yogyakarta. "Tentang hak eksklusif pengelolaan tanah di Yogyakarta, baik yang menjadi otoritas kesultanan maupun

Pakualaman dan tata ruang khusus pula bagi Daerah istimewa Yogyakarta,” kata Presiden. (SKH Bernas, 14 Desember 2010)

c. Desentralisasi dalam konteks keistimewaan DIY

Pandangan politik ini menitikberatkan pada konsep desentralisasi dalam konteks keistimewaan DIY. Kategori ini ditandai dengan pembahasan konsep otonomi daerah, *local goverment reform*, dan semangat kedaerahan yang terkandung dalam substansi keistimewaan Yogyakarta. Contoh:

Kompleksitas hubungan pusat-daerah pasca era reformasi, seiring menguatnya tuntutan otonomi di sejumlah daerah, telah mendorong terjadinya perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan. Dulu, di era Orde Baru (Orba) yang kita ketahui segala pengelolaan serba sentralistik, penerapan paradigma goverment mungkin lebih sesuai. (SKH Radar Jogja, 5 Januari 2011)

G.3 Isi Opini

a. Kritik

Kritik merupakan tanggapan atau respon yang berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya negatif, kecaman, dan umumnya disertai penilaian baik-buruknya terhadap upaya penyelesaian masalah Keistimewaan DIY. Dalam penelitian ini, kritik tercermin dalam pernyataan-pernyataan atau pendapat yang berupa kritik seperti berikut:

”Ini kontroversi, karena tidak sejalan dengan keistimewaan DIY yang selama ini telah berjalan. Ditambah lagi pernyataan Presiden tentang monarki kesultanan. Pernyataan itu kurang tepat bila dipredikatkan ada provinsi ini” (SKH Kedaulatan Rakyat, 6 Desember 2010)

b. Pujian atau dukungan

Pujian atau dukungan adalah pernyataan pendapat yang bersifat memuji, atau positif terhadap upaya penyelesaian masalah keistimewaan DIY. Dalam penelitian ini, pujian atau dukungan tercermin dalam pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau solusi, seperti contoh berikut :

Praktik demokrasi prosedural memang berkembang pesat di seluruh Nusantara selama masa kepemimpinan Presiden SBY ini. Prestasi ini, terlepas dari fakta bahwa yang prosedural belum tentu substansial, patut diapresiasi. Kepemimpinan SBY berhasil mengejawantahkan reformasi sebagai jalan bebas hambatan menuju Indonesia yang demokratis. (SKH Kedaulatan Rakyat, 2 Desember 2010)

c. Saran, harapan, himbauan, solusi.

Saran, harapan, solusi dan atau himbauan ditandai dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan untuk dipertimbangkan, memuat solusi untuk memecahkan masalah, dan atau sesuatu yang diharapkan. Dalam penelitian ini, unsur pengharapan tercermin dalam pernyataan-pernyataan yang berupa ekspektasi atau harapan, seperti contoh berikut :”Kita berharap semuanya berlangsung secara konsisten dan tidak berubah menghadapi ’gerilya’ dan ’agresi’ Jakarta.” (SKH Kedaulatan Rakyat. 10 Desember 2010). Sedangkan saran atau solusi ditawarkan seperti dalam paragraf berikut:

”Maka untuk mengatasinya diperlukan jalan tengah dengan *adendum* atau diamandemen UU No 3/1950 dengan tetap mempertahankan pasal 1 ayat 1 dan 2, pasal berikutnya diisi penegasan substansi istimewa bagi DIY menyangkut Amanat Sejarah Pembentukan Pemerintahan DIY, Bentuk Pemerintahan DIY dan Kepala Pemerintahan DIY”. (SKH Kedaulatan Rakyat, 12 Januari 2011)

d. Gabungan Kritik dan Pujian

Kategori gabungan kritik dan saran bila dalam teks penelitian terdapat pernyataan-pernyataan atau pendapat yang berupa kritik dan juga saran atau solusi permasalahan.

e. Gabungan Pujian dan Harapan

Kategori gabungan kritik dan harapan bila dalam teks penelitian terdapat pernyataan-pernyataan atau pendapat yang berupa kritik dan juga harapan dari permasalahan.

f. Gabungan Harapan dan Kritik

Kategori gabungan saran dan harapan bila dalam teks penelitian terdapat pernyataan-pernyataan atau pendapat yang berupa saran dan juga harapan dari permasalahan.

G.4. Arah Opini

a. Pro Penetapan

Kategori pro penetapan dalam penelitian ini ditandai dengan adanya pernyataan yang ditampilkan mendukung atau menyetujui pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme penetapan, (tidak mendukung atau menolak mekanisme pemilihan), seperti berikut yang tercantum dalam paragraf berikut:

Dukungan lain pun mengalir seperti keputusan politik DPD DIY terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah dilakukan dengan mekanisme penetapan. Begitupun dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan komunitas lokal tetap menyatakan sikap untuk penetapan. (SKH Kedaulatan Rakyat, 14 Desember 2010)

b. Kontra Penetapan

Kategori kontra penetapan dalam penelitian ini ditandai dengan adanya pernyataan yang ditampilkan menolak atau tidak setuju pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme penetapan (mendukung atau setuju pada mekanisme pemilihan), seperti berikut yang tercantum dalam paragraf berikut :

Keinginan pihak SBY itu juga sebenarnya sejalan dengan fenomena empirik aspirasi masyarakat, yang berdasar hasil survei LSI, 71 persen warga DIY menginginkan gubernur/wagub dipilih secara langsung. Yang menginginkan dipilih melalui DPRD hanya 7 persen (dokumen Kemendagri, 2010) (SKH Radar Jogja, 8 Desember 2010)

c. Netral

Kategori netral dalam penelitian ini bila tidak ditemukan pernyataan atau pembahasan mengenai mekanisme pengisian jabatan gubernur atau ditandai

dengan adanya pernyataan bersikap netral, tidak memihak antara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme penetapan maupun pemilihan, seperti berikut yang tercantum dalam paragraf berikut :

Tanpa referendum, bisa saja opsi penetapan atau pemilihan bertentangan dengan demokrasi. Apakah pemilihan gubernur di DIY masih dianggap demokrasi bila ternyata rakyat Jogjakarta menginginkan penetapan? Sebaliknya, masihkah penetapan dipaksakan bila kenyataanya rakyat menginginkan pemilihan? (SKH Radar Jogja, 2 Desember 2010)

H. Metodologi Penelitian

H.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.⁶⁰ Riset kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Riset ini tidak mementingkan kedalaman data atau analisis namun lebih kepada aspek keluasan data sehingga data atau hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi.⁶¹

H.2. Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi sebagai metode pengolahan data opini, seperti yang dikatakan oleh Berelson dan Kerlinger bahwa analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak.⁶² Opini sebagai objek penelitian dalam analisis isi merupakan bentuk komunikasi yang akan

⁶⁰ Kriyantono, *Op.cit*, hlm. 69

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 57

⁶² *Ibid.*, hlm.228

dianalisis dengan cara mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis.⁶³

Artikel opini merupakan representasi pribadi penulis opini yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan dalam rubrik *opinion page* di surat kabar. Pernyataan-pernyataan ataupun pendapat-pendapat secara individu ini akan digeneralisasikan. Penggeneralisasian dilakukan terhadap sampel artikel yang telah dipilih dan diuji melalui alat ukur yang berupa kategorisasi-kategorisasi dalam unit analisis.

H.3. Objek penelitian

Objek penelitian adalah artikel opini-editorial dalam surat kabar lokal SKH Radar Jogja, SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Bernas dalam periode Desember 2010- Januari 2011. Pemilihan periode ini dikarenakan isu mengenai keistimewaan DIY hampir selalu menjadi *headline* dalam surat kabar harian lokal pasca pernyataan Presiden SBY dalam rapat kabinet 26 November 2010 yang menimbulkan respon dari berbagai pihak. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif maka jumlah data atau item yang digunakan sebagai objek penelitian menjadi pertimbangan penulis. Dalam periode tersebut, kemunculan berita dan artikel opini cukup tinggi jika dibandingkan dengan periode-periode lainnya. Dengan demikian mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian dengan jumlah data yang memadai.

⁶³ Bruce Chadwick, Howard Bahr, Stan Albrecht, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, (IKIP Semarang Pers, 1991), hlm.270

H.3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh artikel opini editorial yang membahas isu keistimewaan DIY yang terbit dalam periode yang sudah ditentukan penulis yakni Desember 2010 hingga Januari 2011. Dari data artikel yang memenuhi kriteria diatas, maka terdapat 42 buah artikel yang menjadi populasi dalam penelitian ini.

Selanjutnya untuk menentukan sampelnya, peneliti menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik sampling *purposive sampling*. Pemilihan teknik ini didasarkan pada penelitian-penelitian yang mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian.⁶⁴ Sampelnya adalah artikel opini editorial yang membahas tentang isu keistimewaan DIY yang mengkaji isu tersebut dari sudut pandang politik dalam periode Desember 2010 sampai Januari 2011. Sehingga tidak semua artikel opini-editorial dijadikan sample penelitian. Dengan demikian jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini menjadi 38 buah. Berikut daftar sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1.2. Sampel Artikel Opini-Editorial dalam SKH Kedaulatan Rakyat, SKH Bernas, dan SKH Radar Jogja Terkait Keistimewaan DIY Periode Desember 2010 – Januari 2011

Surat Kabar	Judul Artikel Opini	Jumlah
SKH Kedaulatan Rakyat	Monarki, Demokrasi dan Konstitusi	
	Monarki Versus Demokrasi?	
	Kontroversi Monarki Konstitusi	
	Keistimewaan Yogyakarta Buat Siapa?	
	Kemasan Demokrasi – Perilaku Tirani	
	Demokrasi Meniscayakan Kearifan Lokal	

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.115

	Alternatif Solusi RUU Keistimewaan	27
	RUUK DIY : Pak Beye dan Pak Harto	
	Martabat Ngayogyakarta	
	DIY kembali ke Zaman Kolonial	
	Demokrat, Keraton dan Istana	
	Apa Sih, istimewa DIY?	
	Jangan Posisikan Demokrasi sebagai Palu	
	Ada UU No 3/1950 Bukan Soal Pembentukan DIY	
	65 Tahun Republik Jogja	
	Sesudah Monarki Konstitusional	
	Keistimewaan Yogyakarta di Era Demokrasi	
	RUUK DIY, Perspektif Politik-Kemanusiaan	
	Nasib, Masa Depan dan Status Hukum DIY	
	Mendalami Keistimewaan dan Penetapan	
	Perlu Bekal Semangat 'Golog Gilig'	
	Pro Keistimewaan: Kuantitas atau Kualitas?	
	Basis Keistimewaan Kepemimpinan DIY	
	Perspektif Fiqih Keistimewaan	
	Potret Demokrasi DIY	
	Sisi Lain Keistimewaan Yogyakarta	
	RUUK dalam Perspektif Budaya	
SKH Radar Jogja	Kasus Jogja: Rangkap Dua atau Tiga?	7
	Sidang Rakyat (Jogja)= Demokrasi	
	Sidang Rakyat, Potensi Lahirkan HB XI dan PA x	
	Jakarta-Jogja: Perspektif Government Networking	
	Referendum Menentukan Keistimewaan DIY	
	Antara Ngayogyakarta-Surakarta	
	SBY, Sultan dan Demokrasi Lokal	
SKH Bernas	Pembodohan Rakyat Jogja	4
	Ancaman Kisruh Pengelolaan Tanah di Jogja	
	SBY, Jujurlah pada Rakyat Jogja!	
	Efek 'Erupsi' 26 November	
Total		38

Sumber : SKH Kedaulatan Rakyat, SKH Bernas, SKH Radar Jogja

Artikel opini yang digunakan sebagai sampel penelitian berjumlah 38 buah artikel. 27 artikel bersumber pada SKH Kedaulatan Rakyat, 7 artikel pada SKH Radar Jogja dan 4 artikel pada SKH Bernas.

H.4. Teknik analisis data

- **Distribusi frekuensi**

Analisis data menurut Moleong dalam Kriyantono didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶⁵

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui perspektif atau cara pandang para penulis opini surat kabar terhadap isu-isu politik keistimewaan DIY. Analisis data pada penelitian ini menggunakan riset kuantitatif yakni perhitungan melalui uji statistik. Ada beberapa tahap yang dilakukan peneliti sebelum menganalisis data. Pertama, merumuskan masalah. Rumusan masalah bertujuan untuk membuat batasan masalah yang ingin diketahui peneliti, yakni bagaimana isu-isu politik keistimewaan DIY dari sudut pandang penulis opini dalam surat kabar harian lokal. Tahap selanjutnya adalah, peneliti menentukan unit analisis yang merupakan turunan dari teori dan kerangka konsep dan kemudian melakukan penentuan populasi dan penarikan sampel.

Sampel yang telah dipilih akan diuji melalui kategorisasi-kategorisasi sebagai alat ukur yang diharapkan dapat dipercaya dan reliabel jika digunakan untuk mengukur fenomena yang sama. Agar alat ukur tersebut reliabel maka diperlukan uji reliabilitas (*intercoder reliability*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Holsti untuk melakukan uji reliabilitas, sebagai berikut (Kriyantono,2006:235):

⁶⁵ Kriyantono, *Op.cit*, hlm. 163

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan :

CR : *Coefficient Reliability*

M : Jumlah pernyataan yang disetujui

N1, N2 : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding (hakim) dan periset

Melalui rumus Holsti di atas, peneliti melakukan pretest dengan cara mengkoding sampel ke dalam kategorisasi. Setiap kategori diberi kode angka ([1],[2],[3]..dst) dan periset memilih kategori-kategori yang sesuai pada setiap sampel penelitian. Misal, kategori arah opini, [1]Pro Penetapan [2]Kontra Penetapan [3]Netral dipilih salah satu yang paling sesuai dengan sampel artikel opini. Pengkodingan tidak hanya dilakukan oleh periset namun juga seorang atau lebih yang lain yang berfungsi sebagai pembanding. Pengujian ini dikenal dengan sebutan uji antarkode atau interkode sedangkan pembanding disebut interkoder.

Menurut Birowo, ambang penerimaan yang digunakan untuk menguji reliabilitas kategorisasi adalah 0.60.⁶⁶ Ambang penerimaan tersebut menjadi batas bahwa kategorisasi operasional penelitian dapat dipercaya atau diandalkan.

- **Tabel Silang (*Cross Tabulations*)**

Tabel silang merupakan metode sederhana analisis data yang menggunakan tabel yang berfungsi untuk menjelaskan kecenderungan hubungan

⁶⁶ Antonius Birowo, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Yogyakarta: Gitanyali, 2004), hal 157. Dikutip dari penelitian Skripsi *Kredibilitas Media dalam Pemberitaan Mengenai Mukhtamar Muhammadiyah*, oleh Yoana Berchmans (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011).

antara dua variabel atau lebih.⁶⁷ Dalam penelitian ini, tabulasi silang dilakukan pada variabel unit analisis penulis opini dengan arah atau kecenderungan opini, isi opini dan isu politik. Kategori karakteristik sosial (pekerjaan) penulis opini antara lain akademisi, politisi atau pejabat pemerintah, pengamat atau pemerhati, budayawan, sejarawan, peneliti, pegawai nonpemerintah dan masyarakat awam. Data yang diperoleh melalui sampel penelitian, dimasukkan dalam kategori tabulasi silang kemudian dilakukan interpretasi data terhadap hubungan antar variabelnya.

H.5. Teknik Pengumpulan Data

Riset komunikasi kuantitatif memiliki beberapa metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulann data studi pustaka atau dokumentasi.

Studi pustaka adalah sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yakni mengenai isu keistimewaan DIY, peristiwa-peristiwa terkait maupun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumen publik sebagai data primer yang berupa artikel opini dalam SKH Kedaulatan Rakyat, SKH Bernas dan SKH Radar Jogja yang yang dimuat pada periode Desember 2010 dan Januari 2011. Studi pustaka dalam penelitian ini juga diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian, buku teks, surat kabar dan media internet.

⁶⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.149